

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana penjarahan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa anarkis, serta mengevaluasi kesesuaian Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt dengan tujuan pemidanaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-2, 4, dan 5 KUHP lama, yakni mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dilakukan saat huru-hara, bersama-sama dengan orang lain, serta dengan cara perusakan. Pertanggungjawaban pidana anak telah terpenuhi sesuai teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto, dengan mengacu pada ketentuan UU SPPA. Namun demikian, putusan hakim belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pemidanaan anak. Upaya diversifikasi sebagaimana diwajibkan Pasal 7 UU SPPA tidak tersebut secara eksplisit dalam putusan. Hakim juga mengesampingkan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri yang merekomendasikan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat, serta tidak menjelaskan secara memadai mengapa sanksi alternatif tersebut tidak dapat diterapkan. Penjatuan pidana penjara tanpa pertimbangan yang cukup bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA dan Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban pidana anak, penjarahan, unjuk rasa anarkis*

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of a child offender in the context of looting during an anarchic demonstration, as well as to evaluate the conformity of Decision Number 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt with the objectives of juvenile justice under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (JCJS Law). This study employs a normative legal research method with statute and case approaches. Legal materials consist of primary sources including legislation and court decisions, secondary sources including legal literature, and tertiary sources including legal dictionaries. Analysis is conducted qualitatively-prescriptively.

The findings indicate that the child offender was proven to have fulfilled all elements of Article 363 paragraph (1) items 2, 4, and 5 of the old Criminal Code, namely unlawfully taking property belonging to another person, during a riot, jointly with others, and by means of destruction. Criminal liability was established in accordance with the theories of criminal accountability by Roeslan Saleh and Sudarto, with reference to the JCJS Law. However, the court's decision does not fully align with the objectives of juvenile justice. The diversion process, as mandated by Article 7 of the JCJS Law, was not mentioned in the decision. The judge also disregarded the recommendation of the Correctional Facility (Bapas) of Class II Kediri, which recommended a conditional sentence in the form of community service, without providing adequate reasoning for rejecting the alternative sanction. The imposition of imprisonment without sufficient consideration is inconsistent with the principle of ultimum remedium under Article 81 paragraph (5) of the JCJS Law and Article 37(b) of the Convention on the Rights of the Child.

Keywords: *juvenile criminal liability, looting, anarchic demonstration*